

Komitmen Kuat Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan



Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (dua kiri) memberi keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/4/2019). Susi mengatakan pihaknya akan melakukan penenggelaman terhadap 51 kapal pencuri ikan secara bertahap. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Nampaknya, kebijakan penenggelaman kapal yang diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak bisa digoyahkan begitu saja. Pasalnya, dirinya menilai kebijakan tersebut efektif memberi efek jera terhadap pelaku illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Ketika ditanya apakah melelang kapal tangkapan bisa jadi alternatif lain kebijakan, Susi dengan tegas menyatakan menenggelamkan adalah sikap terbaik yang harus diambil.

"Ya, sudah jelas tenggelamkan dong. Kalau dilelang, nanti ditangkap lagi. Kita berapa kali menangkap, sudah begitu dilelang, dibeli sama yang punya (kapal), lalu nangkap lagi. Memangnya kita kurang kerjaan," ujar Susi Pudjiastuti saat ditemui di Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (14/10/2019).

Susi menjelaskan, kalau dilelang, kapal tersebut kemungkinan besar bisa dipakai untuk mencuri ikan lagi. Sehingga, jalan terbaiknya adalah dengan menenggelamkannya.

Namun dalam konteks tertentu, bisa saja kapal tersebut dijadikan monumen untuk pelatihan atau digunakan untuk hal lain selain dilelang.

"Ya, satu, dua kapal bisa, lah (dijadikan monumen), tidak ditenggelamkan. Tapi selebihnya ditenggelamkan," tutur Susi.

Sebagai informasi, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memusnahkan bentuk IUU fishing dengan mengadakan pertemuan dengan aparat hukum di seluruh dunia. Kali ini, KKP bersama INTERPOL kembali menggelar Regional Investigative and Analytical Case Meeting (RIACM) di Jakarta. Susi bersama dengan perwakilan INTERPOL berdiskusi seputar perkembangan kasus kapal STS-50 dan MV Nika.